

NASIONALISME MASYARAKAT INDONESIA DI PERBATASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA (STUDI DI KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT)

INDONESIA NASIONALISM IN BORDER AREA AND IT'S IMPACT TO SOVERGNITY (STUDY KABUPATEN SANGGAU, WEST KALIMANTAN)

Agus mansyah

**Universitas Pertahanan
(amansyah1988b@gmail.com)**

Abstrak - Kedaulatan suatu negara di perbatasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer yang dimiliki negara tersebut, akan tetapi dengan kemandirian berbagai aspek kehidupan di masyarakat baik ekonomi, sosial dan budaya merupakan bukti berdaulatnya negara tersebut diperbatasan. Kemandirian berbagai aspek kehidupan ini akan berhasil bila masyarakat di wilayah tersebut memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Saat ini nasionalisme masyarakat Indonesia sedang dipertanyakan sehubungan dengan maraknya masalah intoleransi, begitu pula nasionalisme masyarakat Indonesia di perbatasan.

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sebagian besar masyarakatnya mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai menopang hidupnya. Untuk memasarkan hasil pertanian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan segera disebabkan wilayah perbatasan merupakan daerah terisolir yang memiliki infrastruktur jalan dan fasilitas umum terbatas, hal ini yang sering dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat perbatasan mendapatkannya dari Malaysia, kondisi inilah yang sering dinilai masyarakat luas bahwa masyarakat perbatasan mempunyai rasa nasionalisme yang rendah. Walaupun dengan kondisi yang serba terbatas akan tetapi nasionalisme masyarakat di perbatasan masih baik, hal ini dapat dilihat dari aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM masyarakat di perbatasan yang telah di teliti oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme masyarakat Indonesia di perbatasan Kabupaten Sanggau mempunyai nasionalisme yang baik, Pemerintah segera mewujudkan pembangunan infrastruktur dan sarana umum lainnya serta, menanamkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di perbatasan.

Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Wilayah Perbatasan, Nasionalisme Masyarakat Indonesia, Nasionalisme.

ABSTRACTS - The sovereignty of a country on the border is determined not only by the military power of the country, but with the independence of various aspects of life in society, both economic, social and cultural, is evidence of the sovereignty of the country on the border. The sovereignty of a country on the border is determined not only by the military power of the country, but with the independence of various aspects of life in society, both economic, social and cultural, is evidence of the sovereignty of the country on the border.

Sanggau regency is one of the areas directly adjacent to Malaysia, most of its people rely on agricultural products and plantations as sustaining their lives. To market the agricultural products can not be implemented immediately because the border area is an isolated area that has road infrastructure and limited public facilities, this is often complained by the local community. To meet the necessities of life of the border people get it from Malaysia, this condition is often widely assessed that the border community has a sense of nationalism is low. Despite the limited conditions but the nationalism of the people at the border is still good, this can be seen from the aspect of IPOLEKSOSBUDHANKAM people in the border who have been in the research by the researchers.

The results showed that Indonesian nationalism at the border of Sanggau Regency had a good nationalism, the Government immediately realized the development of infrastructure and other public facilities and, instilling national insight to the community on the border.

Keywords: State Sovereignty, Border Area, Nationalism of Indonesian Society, Nationalism.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik, mempunyai wilayah terdiri dari kepulauan dan lautan yang tersebar dari wilayah Barat di pulau We di Provinsi Aceh sampai ke Timur di pulau Papua, letaknya yang sangat strategis menjadikan Indonesia sebagai poros persilangan lalu-lintas laut antara Asia di Utara dan Australia di bagian Selatan, selain itu Indonesia menjadi persilangan arus lalu-lintas pelayaran dari wilayah Barat yaitu Asia Selatan dengan wilayah Timur Asia. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan beberapa negara tetangga antara lain: Malaysia berbatasan di Pulau Kalimantan, Timor Leste berbatasan di pulau timor dan Papua New Guine berbatasan darat di pulau Papua. Selain perbatasan darat, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan beberapa negara antara lain: India dan Thailand di sebelah utara, Malaysia dan Singapura serta Philipina di sebelah Utara, dan beberapa negara di sebelah Timur Indonesia antara lain: Timor Leste, Papua New Gueni dan Kepulauan Palau. Wilayah perbatasan baik darat maupun laut dengan negara tetangga masih mempunyai beberapa

permasalahan yang masih dalam proses penyelesaian.

Luasnya wilayah perbatasan dengan negara lain baik itu wilayah darat maupun wilayah laut akan sangat berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara, seperti yang kita ketahui kedaulatan merupakan sebagai kekuasaan yang tinggi dan mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan merupakan suatu yang hakiki dari suatu negara yang berdaulat yang dibatasi oleh ruang dan waktu, berlakunya kekuasaan tertinggi dibatasi oleh batas-batas daerah negara di luar daerah tersebut negara tidak mempunyai kekuasaan. Begitu pula dengan kedaulatan suatu negara di perbatasan harus dapat menguasai wilayah tersebut secara utuh dan bulat bukan hanya secara militer tetapi dari segala aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Namun saat ini wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain baik di laut maupun di darat, Indonesia belum berdaulat dengan maksimal.

Sedangkan makna nasionalisme secara politis merupakan bentuk dari kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan ataupun mengusir penjajahan serta sebagai pendorong untuk membangun bangsa

dan negaranya. Kurangnya perhatian pemerintah yang menganggap wilayah perbatasan merupakan daerah belakang dari suatu negara sehingga pembangunan yang dilaksanakan belum dapat dinikmati seperti daerah lainnya, hal ini memberikan dampak terhadap jiwa nasionalisme masyarakat di perbatasan itu sendiri. Adapun permasalahan yang ada di perbatasan antara lain: Pertama, kondisi perbatasan yang terisolir dan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga tidak ada wujud pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Kedua, Masyarakat Malaysia di perbatasan tingkat per-ekonomiannya relative lebih baik dari masyarakat Indonesia, hal ini akan berpengaruh terhadap nasionalisme masyarakat di perbatasan. Ketiga, Infrastruktur baik jalan, rumah sakit, pasar dan sekolah terbatas sehingga kehidupan social budaya masyarakat kualitasnya sangat rendah. Keempat, Rendahnya sumber daya manusia di perbatasan menyebabkan daya saing dan kompetensi masyarakat perbatasan selalu kalah dalam persaingan.

Mengingat pentingnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia terutama yang berhubungan dengan kehidupan

masyarakat di perbatasan negara yang akan menentukan masa depan berbangsa dan bernegara nantinya, dengan demikian penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang hasilnya akan dapat dijiwai oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul "Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara (Studi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)".

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana nasionalisme masyarakat Indonesia di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ?
- b. Bagaimana strategi pemerintah dalam menangani masalah nasionalisme masyarakat di perbatasan ?
- c. Apakah kendala yang dihadapi untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat di perbatasan ?

Pembahasan

1. Gambaran Obyek Penelitian

a. **Kabupaten Sanggau.** Kabupaten Sanggau dengan ibu kotanya Sanggau

merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Kabupaten ini mempunyai luas daerah sekitar 12,857,70 km². Di bagian Utara berbatasan dengan Serawak Malaysia, dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau, dibagian Barat berbatasan Kabupaten Pontianak dan Landak, sedangkan dibagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang. kabupaten Sanggau terdiri dari 15 kecamatan, 169 desa/kelurahan dan 833 dusun.

1) Kondisi Geografis. Kabupaten Sanggau berada dibagian tengah dari provinsi Kalimantan Barat yang ber ibu kota Sanggau, dengan luas $\pm 12.857.70$ Km², dengan kepadatan penduduk 29 jiwa/Km², terletak diantara 1° 10" Lintang Utara dan 0° 35" Lintang Selatan serta antara 109° 45", 111° 11" Bujur Timur. Kabupaten Sanggau memiliki 15 Kecamatan dimana Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Posisi Kabupaten Sanggau yang sangat strategis di tengah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia baik di bidang keamanan dan pertahanan maupun di bidang ekonomi, kecamatan Entikong yang merupakan kecamatan terdepan yang

berbatasan langsung dengan Malaysia, mempunyai pos lintas batas terpadu yaitu pos tempat keluar masuk baik barang maupun orang keluar negeri Malaysia, serta merupakan jalur perekonomian terpenting bagi masyarakat di perbatasan.

Kondisi wilayah bagian Sanggau yang berbatasan dengan Malaysia memiliki konter pegunungan yang di tumbuh pepohonan yang lebat dan ada beberapa tempat yang sudah di buka untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan wilayah lain cenderung sama berupa hutan dan perkebunan rakyat baik karet, coklat maupun kelapa sawit. Alam di wilayah Sanggau mengandung berbagai macam mineral dan bahan tambang lainnya yang sampai saat ini pengolahannya masih sangat terbatas dan yang adapun masih di kelola oleh masyarakat secara manual sehingga kakayaan alam tersebut belum dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2) Kondisi Demografi

Luas daerah kabupaten Sanggau $\pm 12.857,70$ Km² atau 8,76 % dari luas Provinsi Kalimantan Barat, dengan jumlah masyarakat 485.980 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 251.605 jiwa dan perempuan berjumlah 234.375 jiwa.

Sedangkan penyebaran penduduk di pedalaman belum dapat terdata dengan baik disebabkan kondisi wilayah yang terisolir belum dapat dijangkau.

Suku Dayak dan suku Melayu adalah suku asli di Kabupaten Sanggau yang masih menjunjung tinggi dan menghormati adat istiadat warisan leluhur mereka, begitu pula dengan agama yang mereka anut, suku Dayak sebagian besar beragama Katholik sedangkan suku Melayu beragama Islam, hal ini menyebabkan menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik sosial di masyarakat berupa SARA seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Selain penduduk asli Kabupaten Sanggau dihuni oleh suku-suku pendatang lain dari berbagai daerah di Indonesia antara lain: suku Jawa, suku Bali, suku Flores dan suku Madura. Suku-suku tersebut tersebar mendiami di berbagai tempat di Kabupaten Sanggau antara lain:

Pertama. Suku Dayak. Ber-domisili menyebar di berbagai tempat di kabupaten Sanggau baik di perkotaan, pinggir sungai mau-pun di pedalaman.

Kedua. Suku Melayu. Ter-sebar di berbagai tempat di Kabupaten Sanggau terutama mendiami di sepanjang sungai

Kapuas dan kota kecamatan dan kabupaten.

Ketiga. Suku Tionghoa. Ter-sebar di berbagai tempat terutama di tengah perkotaan yang ada di Sanggau.

Keempat. Suku Pendatang. Tersebar di berbagai tempat di Sanggau sesuai dengan profesi yang di miliki oleh mereka.

3) Kondisi Sosial

Penduduk Kabupaten Sanggau sebagian besar bermata pencarian sebagai petani baik itu di sawah ataupun di perkebunan, sedangkan yang lainnya sebagai wiraswasta dan pegawai di kantor pemerintahan ataupun anggota TNI/Polri. Hasil kebun rakyat berupa karet alam merupakan komoditi terbesar penghasil pendapatan daerah Kabupaten Sanggau, hasil perkebunan coklat dan lada pun sangat membantu perekonomian masyarakat Sanggau di samping hasil bumi lainnya, perkebunan sawit yang mulai dibangun oleh investor di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Sanggau membuka lapangan pekerjaan yang baru dan menyerap banyak pekerja yang menjadi harapan baru masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Sarana dan prasarana transportasi yang masih terbatas mengakibatkan terkendalanya masyarakat dalam

melakukan aktivitasnya terutama masyarakat yang berada di daerah pedalaman untuk menjual hasil buminya ke kota sehingga banyak masyarakat pedalaman yang menjual hasil buminya dan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan memanfaatkan kemudahan yang di dapat dari negara tetangga Malaysia.

Fasilitas umum berupa sekolah, puskesmas, pasar dan sarana komunikasi masih sangat terbatas dan belum dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama di wilayah pedalaman sehingga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah belum banyak dinikmati oleh masyarakat begitu pula dengan hinggar bingar pembangunan dan perkembangan baik daerah, nasional maupun dunia internasional.

Masyarakat suku Dayak dan Melayu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisional serta agama yang ada di wilayah mereka, mereka sangat hormat dan patuh kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di lingkungan dan wilayah mereka sehingga setiap permasalahan yang timbul di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat maka peran tokoh-tokoh tersebut sangat

berpengaruh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

b. Kecamatan Entikong

Kecamatan Entikong dengan ibukota kecamatan di desa Entikong memiliki luas 506,89 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah 12.828 Jiwa dan kepadatan penduduk brutto adalah 25 jiwa/km². Secara administratif Kecamatan Entikong terdiri dari 5 desa dan 18 dusun. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 147 km dari Ibukota Kabupaten Sanggau. Prasarana yang telah ada terdiri dari jalan negara 14,5 km, jalan kabupaten 41,7 km, jalan desa 83,37 km. Sarana pendidikan yang tersedia terdiri dari 1 unit TK, 18 unit SD/MI, 2 unit SLTP dan 2 unit SMK. Sarana kesehatan terdiri dari 1 unit puskesmas dan 1 unit puskesmas pembantu.

Kecamatan Sekayam dengan ibukota kecamatan di desa Balai Karang memiliki luas 841,01 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah 26.584 Jiwa dan kepadatan penduduk brutto adalah 32 jiwa/km². Secara administratif Kecamatan Entikong terdiri dari 10 desa dan 35 dusun. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 128 km dari Ibukota Kabupaten Sanggau. Prasarana yang telah ada terdiri dari jalan negara 17 km, jalan

kabupaten 65,7 km, jalan desa 102,027 km. Sarana pendidikan yang tersedia terdiri dari 3 unit TK, 28 unit SD/MI, 4 unit SLTP/MTS dan 2 unit SLTA/MA.

Sarana kesehatan terdiri dari 1 unit puskesmas dan 4 unit puskesmas pembantu serta 2 unit poliklinik. Sarana telekomunikasi berupa STO Balai Karang dengan kapasitas terpasang 978 SST dan kapasitas terpakai 528 SST. Sarana ekonomi yang berupa Bank terdiri dari Bank BRI dan BNI. Meskipun Balai Karang secara sosial budaya, ekonomi dan fisik lingkungan melebihi Entikong, namun tulisan ini akan lebih fokus pada pembahasan tentang Entikong karena kawasan inilah yang telah dikukuhkan sebagai pintu gerbang perbatasan yang diwujudkan dalam pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kecamatan Entikong adalah 9,51% per tahun. Angka ini sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sanggau yang hanya 1,44% per tahun. Adapun jenis pekerjaan penduduknya didominasi oleh lapangan pekerjaan dalam bidang per-tanian. Apabila dilihat dari ragam jenis etnis masyarakatnya, disini sangat heterogen antara lain etnis Dayak, Melayu, Jawa, Cina, Banjar, Bugis. Karena etnisnya sangat beragam maka

agama yang dianut juga beragam. Namun demikian toleransi keberagaman di wilayah ini sangat tinggi. Kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Entikong bila dilihat dari pendapatan perkapita penduduknya pada tahun 2005 adalah Rp 2,8 juta (berdasarkan harga konstan). Kondisi ini berada pada urutan ke 10 dari total 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Namun bila ditinjau dari pertumbuhannya menunjukkan angka yang cukup signifikan yaitu sekitar 5% bila dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Entikong ini menunjukkan fenomena yang cukup menarik bila dicermati dari lalu lintas keluar masuknya barang melalui PPLB nya. Pada tahun 2005 nilai barang masuk sebesar 748.328,54 USD sedangkan nilai barang keluar sebesar 2.231.714,16 USD. Angka ini menunjukkan nilai surplus perdagangan dengan Malaysia yang tentunya merupakan prospek yang perlu terus dipacu pada masa yang akan datang. Dengan memperbaiki infrastruktur ekonomi di kawasan ini maka diharapkan kinerja ekonomi dapat meningkat sehingga memberi manfaat langsung dalam kesejahteraan penduduknya.

Keadaan topografi Kecamatan Entikong bervariasi dengan dominasi bentuk

permukaan daratan bergelombang, perbukitan rendah sampai pegunungan yang meliputi 90% dari luas wilayahnya. Fisik lingkungan yang berupa deretan pegunungan, secara geografis terletak membujur Timur-Barat sepanjang garis perbatasan negara. Bentang alam ini tentu saja merupakan suatu potensi alam yang secara alamiah membentuk batas pemisah antar negara. Curah hujan di kawasan ini cukup tinggi yaitu rata-rata 2.856 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 196 hari/tahun. Secara hidrologis kecamatan ini dilalui oleh sungai Sekayam yang merupakan anak sungai Kapuas. Keberadaan sungai ini memiliki peran yang penting dalam memacu tumbuhnya pusat-pusat permukiman penduduk di sekitarnya.

Penggunaan lahan di Kecamatan Entikong di dominasi oleh areal hutan dan pertanian. Sekitar 60% wilayahnya merupakan kawasan lindung (30.413 Ha), dan hanya 40% (20.276 Ha) yang merupakan kawasan budidaya. Sumber pelayanan air bersih untuk kota Entikong yang diusahakan oleh PDAM cabang Entikong saat ini berasal dari sumber air baku sungai Sekayam dengan kapasitas 5 L/dt dan mata air etantik dengan kapasitas 2,5 l/dt. Sebagian besar dari kapasitas air bersih yang berasal dari air baku sungai Sekayam

digunakan untuk melayani kebutuhan rumah tangga sedangkan air bersih dari sumber air baku mata air etantik digunakan untuk melayani kegiatan perdagangan. Pelayanan energi listrik kota Entikong saat ini berasal dari PLN wilayah cabang Sanggau yang memproduksi listrik sebesar 34.600.000 KWH. Dari produksi listrik tersebut untuk Kecamatan Entikong hanya dilayani sebesar 3,5%.

Penduduk Kecamatan Entikong sebagian besar bermata pencarian sebagai petani baik itu di sawah ataupun di perkebunan, sedangkan yang lainnya sebagai wiraswasta dan pegawai di kantor pemerintahan ataupun anggota TNI/Polri. Hasil kebun rakyat berupa karet alam merupakan komoditi terbesar penghasil pendapatan daerah Entikong, hasil perkebunan coklat dan lada pun sangat membantu perekonomian masyarakat Entikong di samping hasil bumi lainnya, perkebunan sawit yang mulai dibangun oleh investor di berbagai tempat di wilayah Kecamatan entikong membuka lapangan pekerjaan yang baru dan menyerap banyak pekerja yang menjadi harapan baru masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Sarana dan prasarana transportasi yang masih terbatas mengakibatkan terkendalanya masyarakat dalam mel-

kukan aktivitasnya terutama masyarakat yang berada di daerah pedalaman untuk menjual hasil buminya ke kota sehingga banyak masyarakat pedalaman yang menjual hasil buminya dan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan memanfaatkan kemudahan yang di dapat dari negara tetangga Malaysia.

Fasilitas umum berupa sekolah, puskesmas, pasar dan sarana komunikasi masih sangat terbatas dan belum dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama di wilayah pedalaman sehingga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah belum banyak dinikmati oleh masyarakat begitu pula dengan hinggar bingar pembangunan dan perkembangan baik daerah, nasional maupun dunia internasional.

Masyarakat suku Dayak dan Melayu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisional serta agama yang ada di wilayah mereka, mereka sangat hormat dan patuh kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di lingkungan dan wilayah mereka sehingga setiap permasalahan yang timbul di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat maka peran tokoh-tokoh tersebut sangat

berpengaruh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

2. Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan

Arti nasionalisme dilihat dari politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengusir penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepantasnya merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia.

a. Ideologi Masyarakat di Perbatasan

Kurangnya kehadiran pemerintah pusat maupun daerah ke wilayah perbatasan dapat mengakibatkan terpengaruh pemahaman ideologi masyarakat seperti paham Komunis dan Liberal Kapitalis serta ideologi lain yang tidak sepaham dengan pemerintah, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara sudah diterima dan dipedomani serta diamalkan oleh masyarakat setempat dalam melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari.

b. Politik Masyarakat di Perbatasan

Dalam berdemokrasi partisipasi dan kontribusi masyarakat mengikuti kegiatan perpolitikan merupakan salah satu kewajiban dan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik akan mendukung jalannya demokrasi di suatu wilayah. Kegiatan politik masyarakat di perbatasan berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari partisipasi dan kedewasaan masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pilkada atau Pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman, begitu pula untuk menyalurkan aspirasinya mereka lakukan melalui wakil-wakilnya di DPRD setempat.

c. Ekonomi Masyarakat di Perbatasan

Kesejahteraan sangat tergantung akan keberhasilan masyarakat daerah tersebut untuk memanfaatkan dan mengolah potensi pertanian serta perkebunan di wilayahnya menjadi komoditas yang dapat diterima di pasar didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Potensi ekonomi masyarakat di perbatasan sangat kaya akan hasil perkebunan dan pertanian serta tambang, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga belum dapat meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

d. Sosial Budaya Masyarakat di Perbatasan

Perkembangan kondisi sosial budaya masyarakat di perbatasan dipengaruhi oleh letak geografi dan ketersediannya fasilitas umum berupa jalan dan rumah sakit serta sekolah. Sosial budaya masyarakat di perbatasan masih rendah ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka terutama sekolah dan rumah sakit, masyarakat sangat memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyangnya, mereka sangat patuh dan taat kepada kepala suku atau ketua adat.

e. Pertahanan dan Keamanan Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan daerah terdepan dari suatu negara, cermin dan gambaran keadaan negara itu sesungguhnya. Pertahanan dan keamanan di perbatasan yang kuat akan berpengaruh terhadap keinginan negara lain untuk mengganggu dan menguasai perbatasan atau ada oknum tertentu yang ingin melakukan kegiatan ilegal di perbatasan. Pertahanan dan

Keamanan di perbatasan masih aman dan terawasi dengan baik oleh petugas pengamanan setempat, pemerintah membentuk satuan pengamanan perbatasan yang berkekuatan satu batalyon dengan menempati pos-pos pengamanan perbatasan di sepanjang perbatasan. Menempatkan satuan kepolisian dan bea-cukai serta imigrasi di pos perbatasan terpadu.

Dengan demikian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nasionalisme masyarakat Indonesia di perbatasan sebagai berikut:

Pancasila sebagai ideologi negara masih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia di perbatasan sebagai ideologi dan pandangan hidup masyarakat.

Aspek politik, Masyarakat di perbatasan sudah memiliki pengetahuan dan kedewasaan dalam mengikuti perpolitikan nasional, setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mereka selesaikan melalui wakil-wakil mereka di DPRD.

Aspek ekonomi, Potensi ekonomi masyarakat di perbatasan sangat kaya akan hasil perkebunan dan pertanian serta tambang, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga belum dapat meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek sosial dan budaya, sosial budaya masyarakat di perbatasan masih rendah ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka terutama sekolah dan rumah sakit, masyarakat sangat memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyangnya, mereka sangat patuh dan taat kepada kepala suku atau ketua adat.

Aspek pertahanan keamanan masih terkendali dengan baik dengan menempatkan satuan pengamanan perbatasan di pos-pos sepanjang garis perbatasan.

3. Strategi Pemerintah Dalam Menangani Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan “serambi atau halaman depan negara” slogan itulah yang kini selalu di suarkan oleh pemerintah dengan harapan wilayah perbatasan yang selama ini terbelakang dari segala hal apalagi pembangunan secara perlahan akan merasakan kemajuan dan pembangunan secara fisik dan sosial sehingga masyarakat di perbatasan secara lahiriah kesejahteraannya meningkat begitu pula secara batiniah mempunyai harga diri dan

kebanggaan sebagai masyarakat Indonesia meningkat.

a. Pembangunan Infrastruktur

pemerintah saat ini lagi giat-giatnya melaksanakan membangun wilayah perbatasan secara skala prioritas dengan mengutamakan infrastruktur berupa jalan di sepanjang perbatasan untuk memecah persoalan wilayah perbatasan yang terisolir sehingga masyarakat perbatasan dapat dengan mudah menjual hasil kebun pertanian dan memenuhi kebutuhan hidup seperti di daerah lainnya di Indonesia. infrastruktur di perbatasan merupakan aspek yang sangat vital dan penting yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga kesejahteraan mereka akan meningkat sesuai dengan wilayah lainnya di Indonesia. Saat ini infrastruktur baik jalan maupun sarana umum lainnya di perbatasan sangat minim.

b. Melaksanakan Pendidikan belanegara

Daerah perbatasan merupakan teras terdepan suatu negara, pengaruh dari negara tetangga akan sangat besar dan kuat, oleh sebab itu pemerintah harus membekali dan membentengi masyarakat dengan wawasan kebangsaan berupa pembekalan pendidikan belanegara.

Bela negara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat di perbatasan, sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman di perbatasan.

Strategi pemerintah untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat dilakukan dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana umum yang dilakukan dengan tujuan untuk membuka daerah perbatasan yang terisolir, sedangkan membangun fasilitas umum lainnya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat di perbatasan akan sebanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu dengan memberikan pembekalan belanegara untuk menyiapkan masyarakat agar lebih cinta terhadap tanah air sehingga mereka memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi guna menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Kendala yang di Hadapi Untuk Meningkatkan Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan

Pertahanan dan Keamanan di perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk satuan pengamanan perbatasan yang berkekuatan satu batalyon dengan menempati pos-pos pengamanan perbatasan di sepanjang perbatasan. Menempatkan satuan kepolisian dan bea-cukai serta imigrasi di pos perbatasan terpadu.

Fasilitas Infrastruktur yang Terbatas merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan untuk menjadikan suatu wilayah atau daerah bergerak maju dan berkembang menjadi daerah yang sejahtera, terisolirnya wilayah perbatasan akan mempengaruhi tingkat nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan, hal ini terjadi karena masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Dengan demikian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, terbatasnya infrastruktur berupa sarana jalan dan sarana lain berupa sekolah dan sarana kesehatan di perbatasan sangat berpengaruh terhadap tingkat nasionalisme

masyarakat di perbatasan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah di perbatasan membuktikan kepada masyarakat setempat bahwa pemerintah peduli dan memperhatikan keadaan masyarakatnya di perbatasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Nasionalisme masyarakat Indonesia di Kabupaten Sanggau.

Pancasila sebagai Ideologi negara masih dipegang teguh oleh masyarakat di perbatasan namun demikian, pemerintah harus mewaspadaikan dan mengantisipasi kemungkinan adanya oknum-oknum dari luar negeri yang ingin mempengaruhi masyarakat di perbatasan dengan menyebarkan dan mengajarkan paham-paham radikal atau ideologi lain.

Kegiatan politik masyarakat di perbatasan berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari partisipasi dan kedewasaan masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pilkada atau Pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman, begitu pula untuk menyalurkan

aspirasinya mereka lakukan melalui wakil-wakilnya di DPRD setempat.

Potensi ekonomi masyarakat di perbatasan sangat kaya akan hasil perkebunan dan pertanian serta bahan tambang, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga belum dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

sosial budaya masyarakat di perbatasan masih rendah ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka terutama sekolah dan rumah sakit, masyarakat sangat memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang-nya, mereka sangat patuh dan taat kepada kepala suku atau ketua adat.

Pertahanan dan Keamanan di perbatasan masih aman dan diawasi dengan baik oleh satuan tugas pengamanan, pemerintah membentuk satuan pengamanan perbatasan yang berkekuatan satu batalyon dengan menempati pos-pos pengamanan perbatasan di sepanjang perbatasan. Menempatkan satuan kepolisian dan bea-cukai serta imigrasi di pos perbatasan terpadu.

b. Strategi pemerintah untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat di perbatasan.

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya di perbatasan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat. Tersedianya infrastruktur sangat didambakan oleh masyarakat untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas perekonomian dan sosial setempat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dibang-unnya aspek tersebut masyarakat akan merasa mendapat perhatian dan kepedulian dari pemerintah, dengan kata lain kehadiran pemerintah di perbatasan sangat diharapkan oleh masyarakat.

Pembekalan bela negara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

c. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat di perbatasan.

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas umum saat ini menyebabkan masyarakat merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, mereka merasa tidak mendapat perhatian dan dipedulikan oleh pemerintah sehingga mereka pun apatis dan tidak peduli akan keberadaan negara.

Berdasarkan Hasil temuan penelitian disimpulkan bahwa, nasionalisme masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau cukup baik.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas yang peneliti laksanakan, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain:

- a. Nasionalisme masyarakat Indonesia di perbatasan.
 1. Perlunya pemerintah untuk meyakinkan kembali kepada masyarakat di perbatasan bahwa Pancasila merupakan Ideologi negara yang tidak dapat digantikan oleh ideologi lainnya.
 2. perlunya pemerintah untuk mengaktifkan kembali koperasi di perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Perlunya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista satuan pengamanan di perbatasan.

4. Perlunya pemerintah memberikan pembekalan, pendidikan dan latihan tentang wawasan kebangsaan dengan materi belanegara kepada semua elemen masyarakat, kepemudaan dan pegawai negeri/swasta di perbatasan secara intensif dan berkelanjutan.

- b. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat.

1. Perlunya pemerintah merealisasikan pembangunan Infrastruktur jalan dan sarana umum lainnya untuk membuka daerah yang terisolir serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

2. Perlunya pemerintah menanamkan nilai-nilai belanegara kepada masyarakat di perbatasan sehingga masyarakat mempunyai daya tangkal yang tinggi untuk menghadapi setiap ancaman yang akan mengganggu keselamatan bangsa.

- c. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat.

Perlunya pemerintah membangun infrastruktur dan sarana umum lainnya di wilayah yang masih terisolir untuk membantu dan mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di perbatasan agar kesejahteraan mereka meningkat sebanding dengan wilayah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. Raharjo (2008). *Karakteristik wilayah Perbatasan. Harapan. Jakarta*
- Althusser, Louis (1990). *Ideologi Nasional. Jakarta: Pelita*
- Anderson, Benedict. (2008). *"Imagined Communities"* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Saru. (2015). *"Hukum Perbatasan Darat Antar Negara"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiharjo (2010). *Politik Negara: Jakarta. Obor*
- Bungin Burhan (1994). *Sosial Budaya di Perbatasan: Jakarta. Sinar Grafika.*
- Creswell, John W. (2016). *Research Design Edisi 4. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Terjemahan). Pustaka Pelajar.*
- Kementrian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta.*
- Grigg (1998). *Pengenalan Infrastruktur. Pelita. Jakarta.*
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2009). *"Batas Wilayah Negara Indonesia"* sebuah Tinjauan Emirisdan Yuridis. Yogyakarta: Gaya Media.
- Hamid, Sri Handoyo Mukti, Tien Widiyanto. (2004). *Kawasan Perbatasan Kalimantan: Permasalahan dan Konsep Pengembangan. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2012). *"Wilayah Negara Indonesia"* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hobbes Thomas (2001). *Sosiologi Manusia. Harapan Asa. Jakarta*
- Jellineck (2001). *Kedaulatan Negara: Obor. Jakarta*
- Jenkin. P Thomas (2011). *Politik Negara: Corong bangsa. Bandung*
- Kamarudin (2010). *Ekonomi Perbatasan. Jakarta, bintang Terang.*
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi (terjemahan). Remaja Rosdakarya, Bandung.*
- Moodie (2010). *Batas Negara. Pelita. Jakarta*

Narbuko & ahmadi (2010). *Methoda Kualitatif*. Jakarta. Remaja.

Nasution (2003). *Methoda Kualitatif*. Pelangi. Jakarta.

Neuman (2006). *Methoda Kualitatif*. Obor. Jakarta

Nugroho (2004). *Pembangunan Wilayah Perbatasan*. Pelita Harapan. Jakarta.

Rafael (2001). *Politik Bersama*. Cahaya. Semarang

Sudarmo. Tirto (2002). *Pertahanan Perbatasan*. Obor. Bandung.

Sударsono, Juwono. (2011). "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Di Indonesia" Sebuah Tantangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Suhanto (2006). *Budaya dan Perbatasan*. Jogjakarta. Obor.

Sumarjan selo dalam Soerjono (2006). *Perbatasan dan Budaya*. Jakarta. Api Obor.

Sukirno (2006). *Ekonomi dan Perbatasan*. Obor, Jakarta

Soltau. F. Roger (2006). *Politikus Gaya Baru*. Obor. Jakarta

Williams, Raymond. (2001). *Negara dan Ideologi*, sinar Obor. Semarang.

Universitas Pertahanan. (2014). *Pedoman Penulisan Karya Akhir Studi*

Universitas Pertahanan. Bogor : Universitas Pertahanan.

Taylor (1975). *Methoda kuantitatif*. Obor. Jakarta

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

JURNAL

Moeldoko, (2012). Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan. Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pertahanan* Maret 2012, Vol 2, No 1.

TESIS

Rusnawir Hamid, (2015). *Carut Marut pembangunan kawasan perbatasan (Kalimantan Barat-Serawak)*

Tri Winarno, (2014). *Strategi Pertahanan Wilayah Perbatasan NKRI-Malaysia (Studi Kasus: Gelar Kekuatan Satgaspamtas TNI AD di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalbar Tahun 2011-2013)*.

I Putu Eka A.P, (2013). Sinergitas TNI, POLRI, Imigrasi dan BPKP Dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat RI-PNG di Kab. Keerom Tahun 2012-2013.

Firman Ependi (2008), Konsep Meningkatkan rasa nasionalisme warga sekitar batas negara di wilayah Kalimantan agar mau berpartisipasi dalam bela negara melalui kegiatan Binter